

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab pertama ini dimaksudkan untuk menguraikan penjelasan tentang hal-hal yang berkenaan dengan persoalan yang akan dibahas dalam disertasi. Akan tetapi pendahuluan ini baru memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, definisi konseptual (penegasan judul), tujuan, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Oleh karena itu, sub-sub bab pada pendahuluan ini meliputi:

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum merupakan peristiwa penting dalam proses politik karena menandakan negara itu demokratis. Pemilu 1999 diikuti oleh empat puluh delapan (48) partai politik. Salah satu partai politik baru yang muncul sebagai kontestan pemilihan umum tahun 1999 adalah Partai Keadilan. Oleh karena tidak terpenuhinya aturan syarat minimal perolehan suara sah (*electoral threshold*) sebesar 3% seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 pada pemilihan umum 1999, maka Partai Keadilan untuk dapat mengikuti pemilu 2004 harus *metamorphosis* (berubah nama) menjadi sebuah partai yang dapat mengakomodasi keinginan kader-kader Partai Keadilan untuk tetap berkontribusi pada perjuangan umat.

Pada tanggal 2 Juli 2002, sebagai langkah strategis dalam menjawab hambatan menyangkut *electoral threshold* maka secara resmi Partai Keadilan merubah namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera, disingkat PKS. Partai Keadilan Sejahtera yang dipimpin oleh Dr. Hidayat Nur Wahid, M.A. ini mempunyai visi “terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat”.

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai Islam yang unik, dan fenomenal dalam kontestasi perpolitikan Indonesia. PKS ini bermula dari Partai Keadilan yang didirikan pada tanggal 20 Juli 1998 oleh para aktivis kampus (Jama'ah Tarbiyah) dan secara resmi dideklarasikan pada 9 Agustus 1998. Dalam menghadapi realitas sosial politik Indonesia, PKS cenderung adaptif, dinamis dan lentur, kendatipun begitu ideologi Islam selalu diusung untuk menjawab persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Asy'ari, 2010: 162-163). Partai Keadilan (PK) merupakan salah satu kontestan yang berazaskan Islam. Ali Said Damanik mencatat bahwa PK adalah satu-satunya partai politik yang memiliki keunikan karena didukung oleh aktivis dakwah kampus, intelektual muda yang berasal dari lingkungan penganut Islam. (Damanik, 2003:xxiii).

Partai politik di negara demokrasi sebagai sarana artikulasi politik. Ini dapat diartikan bahwa partai politik berfungsi untuk menyuarakan atau memperjuangkan aspirasi rakyat yang beragam yang telah disatukan menjadi kehendak bersama melalui berbagai cara, misalnya dengan mendukung kader partai politik yang kompeten atau individu di luar partai politik yang dianggap masih sepaham dengan partai politik itu untuk menjadi pejabat di bidang pemerintahan dengan harapan kebijakan-kebijakan umum (*public policy*) yang akan dihasilkan dapat dipengaruhi (*influenced*) oleh partai politik yang bersangkutan. Bahkan, diharapkan masukan kebijakan-kebijakannya berasal dari partai politik tersebut.

Runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 tidak saja membuka peluang kebebasan bagi kehidupan politik bangsa Indonesia, tetapi juga menumbuhkan hasrat para tokoh politik, agamawan, pengusaha, dan kalangan intelektual untuk menggapai kekuasaan melalui partai politik. Pengekangan mendirikan partai politik selama puluhan tahun tidak dapat lagi dipertahankan. Kehidupan politik pun memasuki babak baru yang penuh gairah.

Laksana burung yang lepas dari sangkarnya, semangat masyarakat untuk mendirikan partai politik sangat tinggi. Ini dapat dilihat dari kisaran 150 partai politik baru yang telah berdiri dalam waktu enam bulan, sejak runtuhnya Orde Baru. (Setiawan dan Nainggolan, 2004: vii, lihat juga Iqbal dan Nasution, 2010:298-300).

Pascareformasi tahun 1998, terjadi fenomena yang sangat menonjol, yaitu munculnya banyak partai baru di antara partai-partai terdahulu yang ikut dalam verifikasi untuk menjadi peserta pemilihan umum tahun 1999. Iklim politik di Indonesia penuh dengan persaingan terbuka. Partai politik membutuhkan suatu metode yang dapat membantu mereka dalam memasarkan ideologi partai, karakteristik pemimpin partai, program kerja partai kepada masyarakat, dan sebagainya. Konsep *marketing* maupun manajemen partai politik perlu diterapkan untuk membangun hubungan dengan pemilih. Implementasi visi, misi, dan tujuan partai perlu diwujudkan melalui berbagai kegiatan sebagai wujud nyata atas fungsi partai politik dalam menyalurkan aspirasi rakyat.

PKS adalah partai yang tidak biasa (*unusual party*), ia lahir dari rahim gerakan sosial bernama Jama'ah Tarbiyah yang kemudian bermetamorfosis menjadi partai politik Islam. Basis sosial partai tersebut adalah kelompok Muslim terdidik, muda, dan golongan kelas menengah kota. PKS tampil sebagai “partai kader” yang militansinya cukup tinggi dengan menerapkan standar ketat, disiplin dalam proses rekrutmen dan pelatihan anggota-anggotanya, juga aktif dalam bakti sosial membantu korban bencana alam di Indonesia. (Muhtadi, 2012: 5).

PKS memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang sistematis dan metodik. Kaderisasi ini memiliki fungsi rekrutmen calon anggota dan fungsi pembinaan untuk seluruh anggota, kader, dan fungsionaris partai. Fungsi-fungsi ini dijalankan secara terbuka melalui infra struktur kelembagaan partai yang tersebar dari

tingkat pusat hingga tingkat ranting. Fungsionalisasi berjalan sepanjang waktu selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai, khususnya dalam bidang penyiapan sumber daya manusia dalam partai. (Rahmat, 2008: 237).

Keterlibatan dalam realitas politik bisa membuat individu atau partai berubah. Kasus Hidayat Nurwahid dan PKS-nya secara umum mungkin adalah kasus terjelas yang membuktikan hal itu. Pada Pemilu 1999, PK sangat kuat berwarna Islam eksklusivis. Seperti banyak partai Islam lain, kampanye utamanya adalah Islam ideologis seperti pemberlakuan syariat dan bagaimana membuat negara lebih Islami. Namun muslim Indonesia tampaknya tidak punya keinginan cukup untuk agenda itu, karena seperti terjadi, banyak dari mereka tidak memilih PK. Bahkan, pada Pemilu 1999, PK hanya mendapatkan 1,7% suara. (Assyaukanie, 2001:254).

Melihat fakta tersebut, PK berubah menjadi PKS pada tahun 2002 kendatipun begitu bukan berarti sekedar mengganti nama saja. Tetapi PKS mengubah strategi kampanyenya, dari menyokong program Islam *exclusive* menjadi mendukung isu-isu yang lebih universal seperti pemerintahan bersih, antikekerasan, dan antikorupsi. Bahkan, PKS berusaha keras menghindari jargon ideologis Islam. Dan, hasilnya cukup mengejutkan! Pada pemilu 2004, partai itu berhasil meningkatkan peroleh suaranya hampir lima kali lipat yaitu menjadi 7,3%. Banyak yang berargumen bahwa keberhasilan PKS itu bukan diakibatkan citra Islam mereka, melainkan lebih disebabkan perubahan strategi kampanye non ideologis mereka. (Assyaukanie, 2001:254).

Pemilu 1999 dengan nama Partai Keadilan atau PK, secara nasional memperoleh 1.436.565 suara atau 1,4 % (7 kursi) dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada Pemilu 2004 dengan perolehan suara 8.325.020 atau 7,34% suara. Namun kemudian jumlah suara PKS menurun dalam Pemilu 2009 yang lalu, yaitu 8.206.955, walaupun prosentasenya

sedikit meningkat menjadi 7,38% karena akibat penurunan jumlah suara sah. Sebagian kalangan, baik internal PKS maupun eksternal melihat stagnasi perolehan suara PKS sebagai sinyal menguatnya dinamika internal partai itu, terutama pasca Pemilu 2004. (Munandar, 2011: 1).

Penelitian ini merupakan studi fenomenologis PKS di Kabupaten Kebumen tahun 1999-2014. Dalam konteks politik lokal Kebumen, PKS pada Pemilu 1999 dan 2004 belum bisa meraih kursi, baru pada Pemilu 2009 PKS memperoleh 2 kursi. Baru kemudian pada Pemilu 2014 perolehan kursi bertambah menjadi 3. Uniknya ketiga kursi anggota DPRD Kebumen dari PKS itu diduduki oleh perempuan yang cukup fenomenal yaitu: Erni Kristanti, 1774 suara (Dapil I: Kebumen dan Buluspesantren), Herni Ning Susanti, 2663 suara (Dapil II: Kutowinangun, Alian, Sadang, Poncowarno), dan Nur Hidayati, 2897 suara (Dapil III: Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Padureso).

Tabel 1.1
Perolehan Suara dan Kursi PKS Kebumen

Tahun	Kontestasi Pemilu Legislatif Kebumen			
	PK		PKS	
	Suara	Kursi	Suara	Kursi
1999	4244	0	-	-
2004	-	-	20965	0
2009	-	-	29569	2
2014	-	-	50355	3

(Sumber Data: Diolah dari berbagai sumber)

Dan, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Bupati) periode 2010-2015 pada putaran kedua PKS berkoalisi dengan partai-

partai Islam lainnya (PPP, PKNU, dan PAN) berhasil memenangkan pemilihan Bupati Kebumen dengan mengusung pasangan H. Buyar Winarso, SE dan Djuwarni, B.A.

Secara sosiologis masyarakat Kebumen didominasi kaum *Abangan* dan *Santri* (Nahdhiyin). Dominasi kaum *Abangan* menjadikan PDIP mendapatkan suara besar. Kaum *Abangan* sebagai kelompok muslim yang tidak terlalu peduli pada praktik formal agama, berbeda dengan santri, muslim abangan sebagian besar tinggal di daerah pedesaan sebagai petani. Dalam politik, mereka cenderung mendukung partai-partai “sekular” atau non-religius seperti Partai Nasionalis Indonesia (PNI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sedangkan kaum *Santri* menyalurkan aspirasi politiknya ke PKB sebagai partai yang lahir dari organisasi keagamaan Nahdhatul Ulama. (Assyaukanie, 2011:5).

Hal ini direpresentasikan dari Pemenang Hasil Pemilu Legislatif Tahun 1999, 2004, 2009, 2014 yaitu PDIP dengan perolehan 19, 16, 11, 9 kursi diikuti PKB memperoleh 9, 7,4,6. Bahkan selama dua periode Pemilihan Bupati Kebumen yaitu periode 2000-2005, dan periode 2005-2010 dimenangkan oleh pasangan Rustriningsih (PDIP) dan K.H. Nashirudin al-Manshur (PKB).

Tabel 1.2
Dominasi Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kebumen.

Pemilu	1999	2004	2009	2014
PDIP (Abangan)	19	16	11	9
PKB (Santri)	9	7	4	6

(Sumber Data: Diolah dari berbagai sumber)

Kemenangan dalam pemilihan Bupati Kebumen dengan mengusung pasangan H. Buyar Winarso, SE dan Djuwarni, B.A. merupakan bukti bahwa PKS telah berproses dan kemudian diterima di masyarakat. Hal yang perlu dicermati mengenai

keberhasilan ini adalah PKS merupakan partai yang relatif baru; belum memiliki basis massa yang kuat, tetapi pada kenyataannya mampu meraih dukungan konstituen yang besar, ini menunjukkan bahwa PKS diterima oleh masyarakat Kabupaten Kebumen.

PKS sebagai partai yang terdiri dari kaum intelektual muda, banyak pihak menilai bahwa basis dukungan PKS adalah masyarakat urban yang terdiri dari kalangan Islam kota terdidik. Terdapat pengecualian untuk membuktikan pendapat ini, karena justru dukungan PKS di Kabupaten Kebumen sebagian besar berasal dari daerah yang tergolong bukan daerah perkotaan dan tingkat pendidikan masyarakatnya tidak terlalu tinggi.

Penelaahan lebih lanjut tentang proses pembentukan PKS (hingga bisa diterima / *welcome*, eksis di Kabupaten Kebumen) dan pembingkai transnasional Islamisnya diharapkan menjadi pintu masuk untuk meneliti faktor-faktor di balik kemunculan PKS dari gerakan sosial yang kemudian bertransformasi menjadi partai politik. Kemudian proses tarik-menarik kepentingan di internal kader PKS juga akan diteliti untuk melihat disorientasi yang terjadi sesudah peralihan menjadi partai politik.

Keberadaan PKS di Kabupaten Kebumen merupakan hal yang menarik untuk dikaji, dikarenakan adanya *gap* yang terjadi atas kelahiran PKS di Kabupaten Kebumen. PKS merupakan salah satu partai politik berazaskan Islam dengan “stigma Wahabi” atau semacamnya yang bertentangan dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang notabene merupakan faham *mainstream* masyarakat Islam di Kabupaten Kebumen.

Berangkat dari persoalan tersebut di atas maka saya tertarik untuk mengkaji “keajaiban” PKS dalam sebuah penelitian yang berjudul: Dinamika Politik Islam di Indonesia Era Reformasi (Strategi Pengembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Kebumen Tahun 1999–2014).

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan penelitian ini, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu: Mengapa PKS eksis di Kabupaten Kebumen? Pertanyaan tersebut selanjutnya dijabarkan dengan pertanyaan penelitian: Bagaimana strategi pengembangan PKS di Kabupaten Kebumen?

Permasalahan penelitian akan dijawab pada bab 3; Basis Sosial PKS di Kabupaten Kebumen. Sedangkan sub pertanyaan akan dijawab pada bab 4; Strategi politik PKS di Kabupaten Kebumen, dan pada bab 5; PKS sebagai integrasi gerakan sosial.

1.3 Definisi Konseptual (Penegasan Judul).

Judul disertasi ini adalah Dinamika Politik Islam di Indonesia Era Reformasi (Strategi Pengembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Kebumen Tahun 1999-2014). Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa: kata *dinamika* secara leksikal (Hornby dan Siswoyo, 2003:109) artinya mempunyai sifat selalu mau bergerak dan sanggup menyesuaikan diri dengan keadaan. Di samping itu juga, dikandung maksud adanya perubahan kekuatan politik umat Islam di Indonesia pada era reformasi.

Politik Islam di Indonesia yang dimaksudkan adalah bahwa dalam ajaran Islam memang tidak terdapat sistem ketatanegaraan (struktur negara Islam), tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan politik (bernegara) secara Islami di Indonesia.

Ada tiga aliran dalam pemikiran politik Islam yaitu: *Pertama* Integrasionis; bahwa Islam menurut paham ini, adalah agama yang sempurna dan lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan bernegara. Dalam Islam terdapat aturan yang serba lengkap, termasuk mengenai sistem ketatanegaraan atau politik. *Kedua* Sekuler, yang menyatakan ajaran Islam tidak ada hubungannya dengan urusan politik (kenegaraan). *Ketiga*, Modernis: dalam Islam memang tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat

tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.(Enayat Khan, bandingkan dengan Andree Heywood).

Dengan demikian, konteks judul “politik Islam di Indonesia” dikandung maksud bahwa antara urusan politik dan urusan agama tidak bisa dipisahkan. Dalam arti, politik merupakan suatu aktifitas manusia untuk kebaikan dalam kerangka nilai-nilai Islam (Abd. Al-Khaliq, 1987:13).

Era Reformasi adalah periode masa pascalengsernya pemerintahan Orde Baru yaitu mulai tahun 1999-2014. Pembatasan tahun 1999 sampai dengan 2014 karena pada masa itu telah terjadi empat kali pemilu legislatif yang diikuti oleh PKS di Kabupaten Kebumen.

Strategi Pengembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Kebumen Tahun 1999-2014 yaitu: cara dalam PKS untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau kegiatan (aksi) PKS untuk mencapai *performance* terbaik yaitu perolehan suara dan kursi dalam kontestasi politik di Kabupaten Kebumen.

Studi ini dilakukan dengan pendekatan fenomenologis dalam menafsirkan “makna” data. Pendekatan ini merupakan analisis deskriptif mengenai esensi atau struktur ideal dari gejala-gejala yang nampak dalam suatu fakta sosial-politik Islam. Dengan demikian, metode ini diharapkan akan memperoleh interpretasi tentang Dinamika Politik Islam di Indonesia Era Reformasi (Strategi Pengembangan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Kebumen Tahun 1999-2014).

Adapun peneliti memilih PKS karena PKS merupakan partai politik berazaskan Islam yang baru lahir di era reformasi. Sedangkan pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Kebumen karena peneliti sendiri adalah asli orang Kebumen sehingga secara politik ekonomi akan menghemat biaya. Dan, masyarakat

Kabupaten Kebumen secara realitas politik didominasi oleh golongan *abangan*, juga kaum *santri*.¹

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya untuk menjelaskan dinamika PKS dan strategi pengembangan yang menyebabkan PKS eksis di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini merupakan studi fenomenologis yang memfokuskan pada pengembangan deskripsi dan eksplanasi secara mendalam tentang dinamika PKS dalam arena politik Indonesia dan politik lokal Kebumen.

¹Representasi dari Pemenang Hasil Pemilu Legislatif Tahun 1999, 2004, 2009, 2014 yaitu PDIP dengan perolehan 19, 16, 11, 9 kursi diikuti PKB memperoleh 9, 7,4, 6. Pemilihan Bupati Kebumen periode 2000-2005, dan periode 2005-2010 dimenangkan oleh pasangan Rustriningsih (PDIP) dan K.H. Nashirudin al-Manshur (PKB). *Abangan* adalah istilah untuk menyebut segolongan orang Islam yang menerima Islam hanya sebagai keyakinan namun jarang melaksanakan ibadah menurut agama Islam dan lebih berpegang pada tradisi yang sudah ada. *Abangan* merupakan gejala kultural sebagai pewarisan terhadap nilai-nilai tradisional yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan *Santri* adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki tingkat pemahaman, penghayatan dan pengamalan Islam yang tinggi. Istilah-istilah itu menunjukkan dimensi –dimensi variasi kebudayaan. Lihat Clifford Geertz, 1983, *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Agama*, (terjemah.terjemah. Aswab Mahasin), Jakarta: Pustaka Jaya.

1.4.2 Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi akademisi

Penelitian ini akan memperkaya bangunan pengetahuan (*body of knowledge*) sosiologi politik, khususnya mengenai organisasi (institusi) partai politik, basis sosial, strategi politik, dan pola hubungan kekuasaan (*power relationship*). Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi praktisi (anggota ataupun elite partai politik), senator, dan para pemerhati politik.

Kegunaan secara praktis yaitu berupa strategi pengembangan yang dapat dilakukan untuk memperkuat upaya menjadi pemimpin politik (*elective political leader*), termasuk di dalamnya terdapat arena kontestasi pemimpin politik secara langsung. Dan, penelitian ini menjadi penting untuk dipakai rujukan dalam memahami gerakan sosial politik Islam khususnya PKS di Kabupaten Kebumen (elite maupun kader partai politik), senator, pejabat pemerintah (birokrat), militer maupun sipil, tokoh / ilmuwan agama, tokoh masyarakat, dan para pemerhati politik. .

1.5 Kajian Pustaka

Sependek pengetahuan penulis, ada beberapa kajian pustaka/riset terdahulu tentang dinamika politik Islam di Indonesia era reformasi (studi tentang fenomena PKS) yang telah dilakukan yaitu antara lain, oleh Anies Rasyid Baswedan (2004). Dalam peta politik Islam di Indonesia ada tujuh partai politik memperoleh suara signifikan dalam Pemilu 1999, Baswedan memposisikan PBB, PPP, PKS (sebelumnya PK), PKB, PAN dan Partai

Golkar ke dalam kategori *Islam-friendly parties*, yaitu bukan saja partai politik berazas Islam, akan tetapi juga sensitive kepada aspirasi umat Islam, serta didominasi oleh tokoh-tokoh yang berlatar-belakang santri. Adapun PDIP diklasifikasikan sebagai *secular-exclusive party* yang menjaga jarak terhadap agenda-agenda Islam.

Karakter PKS ditandai oleh Baswedan sebagai berikut: *Pertama*, sejak awal mulanya berkiprah di arena politik Indonesia PKS menghindari ketergantungan pada tokoh tertentu. *Kedua*, PKS relatif mampu mengelola perbedaan internalnya sehingga terhindar dari perpecahan. PKS dibedakan oleh ciri pertama dan kedua dari keenam partai lainnya. *Ketiga*, PKS, dan juga PAN, tidak memiliki hubungan dengan kekuatan politik masa lalu, sehingga tidak memiliki beban sejarah. *Keempat*, PKS, sebagaimana Golkar, PPP, dan PBB, tidak merepresentasikan salah satu dari dua organisasi Islam mainstream: NU dan Muhammadiyah. *Kelima*, PKS mensiasati jumlah kursinya yang masih relatif kecil di parlemen dengan mengintensifkan aktifitas pelayanan kepada masyarakat yang kemudian dilembagakan dalam bentuk organisasi sayap (wajihah). *Keenam*, berbeda dengan partai-partai lain, PKS mengakses para anggota sampai ke level terbawah sepanjang waktu, terutama melalui pertemuan rutin *halaqah* tiap sepekan. Pertemuan tersebut lebih dari sekedar forum untuk membahas isu-isu politik, karena juga merupakan sarana peningkatan pemahaman agama, pelibatan anggota, rekrutmen anggota baru, dan pembentukan disiplin berpartai. *Ketujuh*, berbeda dengan PBB dan PPP, PKS tidak memfokuskan pada upaya mengadopsi syariah secara formal dalam perundang-undangan, melainkan memusatkan perhatian pada dakwah untuk mengedukasi umat mengenai syariah Islam.

Terkait dengan ciri-ciri yang telah diuraikan di atas, Baswedan memprediksi bahwa PKS berpotensi sebagai “*a major player*”. Peningkatan perolehan suara PKS yang cukup menakjubkan pada Pemilu 2004 (7,34%) dibandingkan PK tahun 1999 (1,4%) menunjukkan bahwa prediksi tersebut relatif tepat, kendatipun kemudian pada Pemilu 2009 perolehan suara PKS mengalami stagnasi.

Yon Machmudi sebagai *insider* telah melakukan kajian yang relatif komprehensif tentang PKS. Machmudi mengungkapkan bahwa PKS memiliki sejarah yang panjang: halaqah yang berlanjut dengan lembaga–lembaga kajian keislaman intra–kampus, kemenangan tampuk kepemimpinan lembaga–lembaga kemahasiswaan, pendirian jejaring gerakan dakwah ekstra kampus melalui Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) yang kemudian membidani Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menjelang Reformasi 1998, dan akhirnya mendirikan Partai Keadilan (PK) 28 Juli 1998 dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 20 April 2003. Sebagai tulang punggung PKS, Jemaah Tarbiyah terinspirasi oleh Hasan al–Banna, pendiri Ikhwan al–Muslimin yang sufistik dan menekankan toleransi terhadap keragaman praktik keagamaan di antara umat Islam. Implikasinya, dalam banyak hal PKS memilih langkah akomodatif dan pragmatis, misalnya tidak mengedepankan formalisasi syariat Islam dan berkoalisi dengan beragam kekuatan politik, bahkan dengan partai lain (non Islam), dalam sejumlah Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Machmudi (2008) menyimpulkan bahwa doktrin “*al–jama’ah hiya al–hizb wa al–hizb huwa al–jama’ah*”(jamaah adalah partai dan partai adalah jamaah), dan “*yakhtalituna walakinna yatamayyazun*” (bercampur namun berbeda) sering menimbulkan dilema bagi para kader ketika bergerak di arena politik. Sikap akomodatif, bahkan pragmatis, sebagai turunan

dari doktrin tersebut, sering tidak memuaskan seluruh konstituen PKS. Walaupun hingga saat ini PKS masih yang paling solid di antara partai-partai Islam, tetap terdapat “riak-riak” friksi internal yang relatif kuat dan terbaca oleh publik eksternal. Walaupun sudah menyinggung adanya sebagian kecil kader yang mengkritisi kinerja dan beberapa kebijakan partai, Machmudi (2008) belum banyak mengupas dinamika internal, khususnya kecenderungan faksionalisasi dalam PKS, tarik-menarik antara idealisme partai dakwah dan pragmatisme partai politik, dan implikasinya terhadap proses pengambilan keputusan, struktur organisasi, aturan main, serta pola relasi yang ada.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dirangkum dalam:

Tabel 1.3. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Kesimpulan
01.	Anies Rasyid Baswedan	Politik Islam di Indonesia; Lintasan Sekarang dan Masa Depan. (Jurnal Survei Asia, Vol.44 No.5 Sept./Okt..2004 hlm.669-690.	Bahwa tujuh partai yang meraih suara signifikan dalam Pemilu 1999, Baswedan menempatkan PBB, PPP, PKS, PKB, PAN dan Partai Golkar ke dalam kategori <i>Islam-friendly parties</i> , sedangkan PDIP sebagai <i>secular-exclusive party</i> yang menjaga jarak terhadap agenda- agenda Islam.
02.	Yon Machmudi	Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia, Syaamil Cipta Media, 2006	Sejarah panjang PKS: halaqah yang berlanjut dengan organisasi mahasiswa, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) yang membidani Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menjelang

		(Disertasi)	Reformasi 1998, dan akhirnya mendirikan Partai keadilan (PK) pada tanggal 28 Juli 1998 yang berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tanggal 20 April 2003. Intinya, Machmudi memfokuskan kajian pada asal-usul, ideology, dan pengaruh PKS terhadap Islam di Indonesia. Ia menyatakan bahwa: “PKS tidak berupaya mengusung penerapan syariah melainkan mencoba merevisi citra partai dengan mencurahkan energy pada isu-isu keadilan dan kesejahteraan.
03.	Ali Said Damanik	Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia, 2002 (Disertasi)	Bahwa PKS adalah partai politik yang memiliki akar dalam gerakan dakwah kampus. Damanik berpendapat bahwa transformasi PKS dari gerakan mahasiswa menjadi gerakan politik dimungkinkan oleh dua pengaruh global: revolusi Iran tahun 1979 dan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dan, dia menyimpulkan bahwa PKS lebih dipengaruhi oleh aktifis dan gagasan-gagasan Ikhwanul Muslimin melalui tulisan-tulisan para ideolog Ikhwan seperti Hassan al-Banna dan Sayyid Quthub ketimbang Revolusi Islam di Iran.
04.	Arief Munandar,	Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader	Kiprah PKS pada arena politik Nasional ditentukan oleh kapasitas tindakan kolektifnya. Dalam arti, ada lonjakan perolehan suara di Pemilu 2004 ketimbang Pemilu

		PKS dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004. (Disertasi)	1999 mencerminkan peningkatan pada kualitas aksi kolektif PKS. Sebaliknya, stagnasi prestasi PKS di Pemilu 2009 juga menunjukkan bahwa dari 2004 ke 2009 tidak terdapat peningkatan yang cukup berarti pada kapasitas aksi kolektif PKS. Hal ini terjadi karena ada pelemahan kohesi sosial atau <i>group inclusiveness</i> .
05.	Aay Muhammad Furkon,	PKS: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer, 2004 (Disertasi)	Bahwa PKS tidak dapat sepenuhnya dilihat sebagai cabang (<i>off shoot</i>) Ikhwanul Muslimin. Menurut Furkon, PKS tidak mempunyai pemimpin atau tokoh kharismatik, berbeda dengan Ikhwanul Muslimin yang sangat bergantung pada ketokohan al-Banna. Bagi Furkon, justru pandangan politik PKS sejalan dengan modernisme Islam.
06.	Nasirwan	Dilema Transfromasi Partai Keadilan Sejahtera (Disertasi)	Bahwa Transformasi dari Gerakan Jemaah Tarbiyah menjadi partai politik dipengaruhi oleh dua faktor, faktor internal (Corak pemahaman Islam-ideologinya tidak memisahkan antara Islam dan Politik; sosial dan jaringan dakwah, dan kader militant) dan faktor eksternal (<i>political opportunity</i>). Transformasi yang dihadapi oleh gerakan ini baik internal maupun eksternal adalah transformasi terbatas dan memicu dilemma bagi

			Partai Keadilan Sejahtera. Ada tiga level dilema yaitu dilema doktrin, strategi dan outcomes (<i>muwashofat</i>). Ada kecenderungan <i>discontinuity process</i> antara pemahaman dalam ranah keyakinan (ideologi) yang kompleks dan pemahaman dalam ranah politik yang pragmatis. Transformasi yang tergantung pada kegiatan tarbiyah dan menggunakan <i>political opportunity</i> yang sudah ada tidak mampu mendapatkan dukungan yang signifikan dari Gerakan Jemaah Tarbiyah
07.	Bubalo dan Fealy	Joining the Caravan? Middle East, Islamism, and Indonesia, Lowy Institute for International Policy, Australia, 2005	Bahwa PKS terinspirasi oleh Ikhwanul Muslimin. Berhubung agenda aksi PKS diletakkan dalam bingkai partai politik yang mencari dukungan massa dari public, Bubalo dan Fealy menyimpulkan bahwa dampak sosial-politik PKS jauh lebih luas dan massif ketimbang gerakan salafisme radikal.
08.	Burhanudin Muhtadi	Dilema PKS: Suara dan Syariah (Tesis)	Memotret fenomena PKS dari sudut pandang akademis, mulai dari asal-usulnya sebagai Jama'ah Tarbiyah pada masa Orde Baru, pengaruh ideologis dari Ikhwanul Muslimin Mesir, pendirian Partai Keadilan pada awal Reformasi, sampai dinamika internal antara berbagai aspirasi dalam PKS. Juga, dibahas mengenai strategi PKS memperjuangkan agenda politik Islamis-nya di panggung politik

			Indonesia.
09.	Haedar Nashir	Gerakan Islam Syariat:Re-produksi Salafiyah Ideologis di Indonesia, 2007 (Disertasi)	Bahwa Gerakan Islam di Indonesia seperti memasuki fase baru. Pergeseran isu global sejak tragedi 11 September telah memicu artikulasi yang lebih vokal dari kelompok-kelompok yang memperjuangkan formalisasi agama dalam negara. Fase baru itu ditandai dengan perjuangan melalui jalur konstitusional dengan memunculkan peraturan-peraturan (perda) bernuansa syariat. Gerakan-gerakan ini melirik kembali nilai-nilai ajaran salaf yang dianggap sebagai solusi-kritis-tunggal dengan militansi yang andal dan cermat dalam beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Gerakan tersebut juga terjadi pada partai politik, salah satunya PKS.
10.	Pradana Boy	Jurnal Maarif Institute vol 8 no 2 Desember 2013, hlm. 38.	Bahwa salah satu ekspresi politik umat Islam Indonesia yang dewasa ini tengah berkembang adalah model Islamis-formalis. Model politik ini mengedepankan simbol-simbol keislaman dalam aktivitas politik dan sering mengeksploitasi doktrin-doktrin agama untuk kepentingan politik praktis. Umumnya, gerakan-gerakan politik seperti ini menjadikan formalisasi syariah sebagai tujuan utamanya. Dengan mengambil contoh kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),

			<p>tulisan ini berpendapat bahwa pada masa-masa mendatang, politik kelompok Islamis akan mengalami tantangan serius, dan karena itu kemungkinan untuk gagal jauh lebih besar ketimbang berhasil. Salah satu alasannya adalah trauma terhadap politik aliran yang hanya memperkeruh ketegangan, ditambah dengan trauma atas kepemimpinan nasional yang tidak efektif, menjadikan masyarakat lebih cenderung menentukan kepemimpinan berbasis kinerja.</p>
11.	M. Faishal Aminudin,	Jurnal Studi Pemerintahan Volume 1 Nomor 1 Agustus 2010, hlm. 129	<p>Mengeksplorasi reorganisasi PKS pada periode-periode penting perjalanan partai, bahwa perubahan nama dari PK menjadi PKS yang membawa perubahan tipologi fundamental dari partai dakwah menjadi partai yang berbasis mobilisasi massa untuk reorganisasi partai. Pada periode perubahan tersebut, PKS sukses dalam mengatur ideologi dan jaringan dengan unsur-unsur politik lainnya. PKS menjadi salah satu partai di Indonesia yang berpengaruh di masa yang akan datang.</p>
12.	Teguh Imansyah	Jurnal Rechts Vinding Volume 1 Nomor 3 Desember 2012	<p>Realitas yang berkembang saat ini menunjukkan lemahnya kelembagaan partai yang ada saat ini. Keadaan tersebut terlihat dari menurunnya tingkat kepercayaan terhadap partai dan maraknya kasus pelanggaran hukum yang terjadi</p>

			<p>pada para kader partai. Permasalahannya adalah bagaimana regulasi sistem kepartaian yang ada dalam membentuk kelembagaan partai untuk memenuhi fungsinya sebagai partai politik sesuai dengan undang-undang. Regulasi kepartaian yang ada belum berpengaruh signifikan dalam penguatan kelembagaan partai. Lemahnya kelembagaan partai yang ada saat ini lebih disebabkan oleh sistem internal partai yang belum modern.</p>
--	--	--	---

Disertasi ini diramu dari kepustakaan yang ada, dan mengkaji tentang eksistensi PKS dengan strategi pengembangannya di Kabupaten Kebumen. Bahwa PKS adalah partai politik modern di era reformasi yang berazaskan Islam. Keberadaan PKS di Kabupaten Kebumen dapat dikatakan cukup fenomenal karena penambahan perolehan suara yang cukup signifikan dari Pemilu 1999, 2004, dan 2009, dan 2014 (**lihat Tabel 1.1 di atas**). Hal inilah yang menjadikan kekhasan (unik) ketimbang penelitian-penelitian tersebut di atas karena PKS Kabupaten Kebumen sudah barang tentu memiliki strategi tersendiri dalam meraih suara pada setiap kontestasi demokrasi.

1.6. Kerangka Teori

Untuk membahas dan menganalisis permasalahan di atas secara menyeluruh maka dibutuhkan dasar-dasar teori yang memadai. Adapun dasar-dasar teori itu meliputi: *basic* sosial, strategi politik, dan pendekatan integrasi gerakan sosial.

Strategi politik merupakan dasar teori yang digunakan untuk mengetahui strategi pengembangan yang dilakukan oleh PKS, sehingga PKS dapat diterima di Kabupaten Kebumen. Kata

strategi bisa diartikan sama dengan kata cara. Strategi adalah kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ada atau aksi dalam organisasi untuk mencapai performance terbaik. Strategi politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan ini bersifat empirik karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial (Anwar, 2015). Realitas sosial politik menuntut digunakannya pendekatan-pendekatan baru dalam kehidupan politik Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi beradab. (Rini, 2012).

Pergeseran sikap dan langkah PKS di Indonesia bermula dari sebuah *halaqah* kemudian berkembang menjadi partai berbasis Islam dan bahkan berkembang menjadi partai yang nasionalis. Gerakan tarbiyah banyak disebut-sebut sebagai inspirator PKS karena beberapa di antaranya menjadi pendiri PK pada tahun 1998 sebagai reaksi dari tekanan politik yang dilakukan oleh Orba pada gerakan Islam. (Aminuddin, 2010). PKS merupakan partai yang berbasis kader pada mulanya, namun dalam perkembangannya PKS melebarkan sayapnya dengan partai berbasis massa sebagai perluasan basis sosial.

Urgensi ideologi bagi partai politik berangkat dari basis dasar terbentuknya yang merupakan bentuk pengorganisasian orang-orang dengan kesamaan ide. (Bariroh: 2014). Keberadaan PKS pada posisi kontinum sebelah kanan yang kemudian secara perlahan tetapi pasti, bergerak menuju ke tengah. Pergerakan ke tengah dapat dibaca dengan melihat adanya perluasan basis sosial PKS dari golongan Islam terdidik ke golongan-golongan lain di luarnya. Perolehan suara PKS pada Pemilu 2004 bisa dibaca sebagai titik awal dalam rangka perluasan basis sosial partai.

Persaingan antar partai politik akan semakin sengit dalam mendapatkan suara, apa lagi dengan munculnya partai baru yang tentunya mempunyai warna baru dan harapan baru. Partai politik hadir dengan asa yang dibawa, yaitu ingin memperjuangkan atau

mewujudkan masyarakat yang didam-idamkan. Dan, dengan menawarkan banyak harapan, bagaimana cara mewujudkan, tipe masyarakat yang mana akan menjadi basis perjuangan; apakah petani, buruh, atau nelayan, masyarakat yang ada di perkotaan atau pedesaan dan sebagainya. (Prasetya, 2011). Kelahiran PKS di Kabupaten Kebumen tentunya mengalami hambatan, lebih lanjut ketika mempertahankan eksistensinya dalam persaingan dengan partai-partai pendahulunya.

Konsep *political opportunity structure* sangat relevan untuk membangun gerakan sosial karena dapat menjelaskan bahwa peluang politik yang terbuka akan mendorong kelompok-kelompok gerakan sosial untuk memanfaatkannya sebagai ruang untuk melakukan tekanan atau mendesak agenda-agenda gerakan agar dapat mencapai tujuannya. Bahkan, tidak hanya peluang politik di tingkat lokal dan nasional, melainkan terbukanya peluang politik di tingkat internasional pun ikut mendorong muncul dan meluasnya gerakan sosial. (Jauhari, 2014:7). Sehingga melalui pendekatan integrasi gerakan sosial dapat diketahui tentang proses integrasi gerakan sosial yang terjadi antara PKS dengan kaum nahdliyin di Kabupaten Kebumen.

PKS telah melakukan aksi kolektif dan kontestasi dalam rangka membentuk *negotiated order*. Hal ini merupakan kesepakatan umum (*general agreement*) bahwa gerakan berorientasi identitas (*identity-oriented movements*) dan tindakan kolektif (*collective actions*) adalah merupakan ekspresi tentang upaya penyelidikan tentang identitas (*identity*), otonomi (*autonomy*), dan pengakuan (*recognition*) manusia. (Sukmana, 2013). Tindakan kolektif dan kontestasi yang dilakukan PKS di Kebumen berhasil membawa *negotiated order* yaitu terlihat pada keberhasilan kelahirannya di Kabupaten Kebumen serta kemenangan pasangan calon kepala daerah yang didukung PKS walaupun PKS berbeda dengan faham yang dianut sebagian besar

masyarakat Kebumen. PKS berhasil dalam tujuan politiknya, namun begitu warga nahdliyin dan abangan tidak merasa terganggu.

1.6.1 Basis Sosial

Almond mengatakan bahwa partai politik bisa dibedakan menurut basis sosialnya, yaitu terdiri dari:

1. Partai politik yang berasal dari lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah.
2. Partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok kepentingan tertentu, seperti kelompok petani, buruh, pengusaha, dan sebagainya.
3. Partai politik yang berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, budaya, dan daerah tertentu. (Surbakti, 1992: 123).

Basis-basis sosial di atas merupakan elemen dasar bagi terbentuknya partai politik. Basis pembentukan partai politik bisa juga berdasarkan pada kesamaan ideology yang dipahami oleh kelompok-kelompok tertentu. Akan tetapi, pada kenyataannya, kebanyakan partai politik tidak hanya memiliki basis sosial dari kalangan tertentu, tetapi terdiri dari berbagi basis sosial.

1.6.2 Strategi Politik

Gatot Widayanto menyatakan bahwa asal mula munculnya strategi berawal dari lingkungan militer, sekitar 500 tahun Sebelum Masehi. Jenderal Sun Tzu mengartikan strategi sebagai salah satu cara untuk dengan mudah menaklukkan lawan, kalau perlu tanpa pertempuran, atau dengan kata lain strategi diperlukan jika ada lawan. (Rudianto dan Sudjijono, 2003: 16). Faudy Tjiptono menyebutkan bahwa istilah strategi itu sendiri berasal dari bahasa Latin Yunani, *strategia*, yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi

seorang jenderal. Konsep ini jelas sesuai dengan situasi pada zaman dahulu yang sering diwarnai perang, di mana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar selalu dapat memenangkan peperangan.(Rudianto dan Sudjijono, 2003: 16).

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik. (Schroder, 2000: 7). Begitu pentingnya penerapan strategi sehingga setiap kelompok masyarakat harus mampu bersaing menyusun sebuah strategi politik yang mampu memberikan kemenangan. Karena, tanpa strategi politik, kekuasaan yang merupakan tujuan utama berpolitik tidak akan pernah terwujud. Dalam konteks manajemen, strategi dikenal dengan istilah *management-strategic*. Di samping itu, organisasi partai politik telah mengadopsi prinsip-prinsip manajemen pemasaran, terutama dalam kerangka berpikir strategi pemasaran. Akibatnya, istilah-istilah pemasaran pun telah lekat dalam konteks strategi dalam dunia politik.

Strategi politik sangat penting untuk sebuah partai politik, tanpa adanya strategi politik, perubahan jangka panjang sama sekali tidak akan dapat diwujudkan. Untuk mencapai cita-cita politik yang dimaksud, Peter Schorder membagi strategi ke dalam dua bagian; strategi *ofensif* (menyerang) dan juga strategi *defensif* (bertahan). (Schroder: 2000:8).

Strategi *ofensif* (menyerang) yaitu apabila sebuah partai politik ingin meningkatkan jumlah pemilihnya atau ingin meningkatkan perolehan suaranya. Untuk menjalankan strategi ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pandangan positif terhadap partai sehingga kampanye dapat berhasil. Model strategi ini lebih ditujukan pada adanya perbedaan-perbedaan yang jelas dan menarik antara partainya dan juga partai politik yang lain, yang tujuannya

untuk mengambil alih pemilihnya. Sementara strategi *defensif* (bertahan) yaitu apabila partai politik yang berkuasa atau koalisi pemerintahan ingin mempertahankan mayoritasnya atau jika pangsa pasar (politik) hendak dipertahankan. Strategi ini juga dapat muncul apabila sebuah pasar tidak akan dipertahankan lebih lanjut atau akan ditutup. Penutupan pasar ini diharapkan membawa keuntungan yang sebesar-besarnya. (Schroder: 2000:8).

Penulis berpendapat bahwa strategi partai politik adalah cara atau upaya yang harus dilakukan oleh partai politik untuk memperoleh dukungan yang sebesar-besarnya dari calon konstituen. Oleh karena itu, cara yang dimaksud adalah dengan melaksanakan atau memaksimalkan fungsi partai politik bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat adanya partai politik. Fungsi-fungsi tersebut tidak hanya diimplementasikan menjelang Pemilu, tetapi juga pascapemilu. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah partai politik cenderung meninggalkan konstituennya ketika kekuasaan telah diraih.

1.6.3 Pendekatan Integrasi Gerakan Sosial

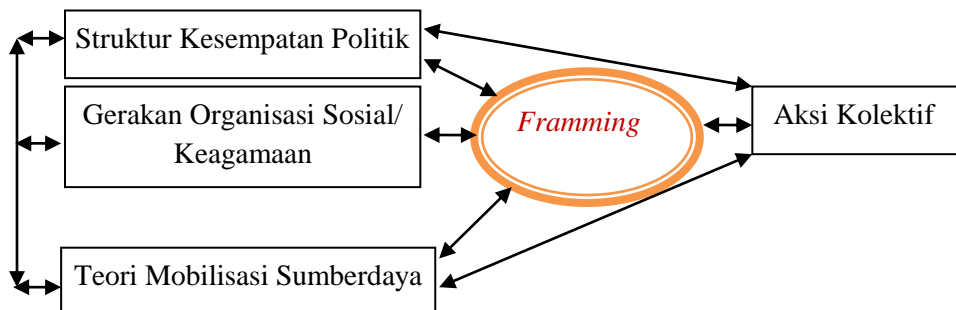
Dalam tradisi penelitian gerakan sosial, hampir semua perspektif kajian ini adalah menjelaskan, pertama-tama dan yang paling utama, teori-teori munculnya gerakan sosial, karena partai politik lahir dari sebuah gerakan sosial. Kajian gerakan sosial memfokuskan diri pada upaya sistematis untuk memahami: *Pertama*, asal-usul gerakan sosial dan faktor-faktor serta proses-proses yang membentuk atau menjelaskan kemunculan gerakan sosial tersebut. *Kedua*, diseminasi dan pembentukan atau pengorganisasian gerakan. (Muhtadi, 2012: 20). Di kalangan sarjana gerakan sosial terdapat kesepakatan yang muncul terkait pentingnya tiga faktor gerakan sosial yaitu: 1). *political opportunities* (kesempatan politik), 2). *mobilizing structures* (struktur

mobilisasi) atau *resource mobilization* (mobilisasi sumber daya), 3). *framing processes* (proses pembedaan).

Sebelum terjadi integrasi perspektif gerakan sosial, setiap *trend* intelektual dari ketiga faktor tersebut di atas lebih menekankan pada satu aspek gerakan saja. Misalnya, para pendukung mobilisasi sumber daya (*resource mobilization*) lebih menekankan pentingnya dinamika organisasi ketimbang aksi kolektif, sementara para pendukung pembedaan aksi kolektif (*collective action frames*) mengkritik teori mobilisasi sumber daya (*resources mobilization*) dan kesempatan politik (*political opportunity*) karena terlalu banyak memberi pada masalah-masalah politik dan organisasi, tetapi mengabaikan pentingnya konstruksi sosial sebuah gagasan.

Untuk itu, penelitian ini tidak akan menjelaskan setiap faktor secara terpisah dan juga tidak akan memberi porsi pembahasan lebih banyak terhadap satu aspek tertentu saja dalam gerakan sosial. Studi ini justru akan menggabungkan ketiga trend atau faktor yang muncul dalam penelitian gerakan sosial tersebut di atas. Masing-masing pendekatan akan diperlakukan sama dalam bentuk yang terintegrasi satu sama lain ketimbang secara terpisah (lihat gambar).

Gambar 1.1.
Pendekatan Integrasi Gerakan Sosial



Berdasarkan gambar tersebut, perspektif integrasi gerakan sosial adalah kombinasi pendekatan atas “situasi dan kondisi” (*conditions*), “norma-norma” (*norms*), dan “instrument-instrumen” (*means*) aksi kolektif. Mc Adam dkk., mengidentifikasi tiga faktor yang saling berhubungan, yaitu mekanisme lingkungan (*environmental*), relasional, dan kognitif. Argumen utama mengapa perlu untuk meneliti kondisi-kondisi atau situasi adalah bahwa berhasil atau tidaknya aktivis gerakan dalam mengembangkan klaim-klaim tertentu, mobilisasi supporter, dan menyebarkan pengaruh adalah sangat tergantung pada konteks sosial politik. Dalam hal ini, kajian gerakan sosial fokus pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kapasitas actor dalam menciptakan perubahan. Inilah yang kemudian dikenal sebagai struktur kesempatan politik yang menekankan signifikansi kesempatan politik yang terbuka celahnya ketika negara begitu rentan (*vulnerable*) sehingga memicu munculnya gerakan-gerakan sosial.

Kendatipun begitu, perlu dalam perhatian bahwa ketergantungan pada kesempatan politik saja tidak akan mampu menciptakan gerakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh McAdam dan Snow “situasi politik yang paling mendukung sekalipun hanyalah menciptakan potensi struktur tertentu bagi munculnya aksi kolektif”. Ketika kapasitas organisasi dan jejaring yang memadai tidak terpenuhi, maka potensi politik yang kondusif tersebut tidak akan terwujud dalam gerakan sosial. Jadi, studi tentang “alat atau instrument” (*means*) atau mekanisme relasional sangat penting bagi para aktifis, dalam rangka menyediakan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk aksi kolektif. Setidaknya ada tiga aspek infrastruktur yang sangat penting yaitu: basis keanggotaan, jejaring komunikasi, dan pemimpin atau tokoh gerakan. Kajian ini dikenal sebagai pendekatan *resource mobilization* (mobilisasi sumber daya). (Muhtadi, 2012.:22-23).

Kemudian dalam pendekatan gerakan sosial juga ada proses “pembingkaihan aksi kolektif” yaitu penelitian menyeluruh terhadap mekanisme kognitif dan norma-norma yang sesuai dengan gagasan dan cita-cita bersama. Pembingkaihan adalah skema penafsiran yang “memungkinkan para pendukung gerakan sosial agar bisa memosisikan, menerima, dan menandai peristiwa-peristiwa.” Dengan kata lain, proses pembingkaihan menunjukkan “apa yang musti dilihat, apa yang dianggap penting, sehingga para aktifis mampu menjelaskan apa yang sedang terjadi.” Jadi, gagasan dan konstruksi keyakinan yang mendasari adanya gerakan sosial dinilai tak kalah penting dengan faktor mobilisasi sumber daya organisasi dan terbukanya proses kesempatan politik. (McAdam, Tarrow & Tilly, 2001: 25-26).

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena gejala (*fenomena*) yang diteliti adalah gejala sosial-politik yang dinamis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber utama yaitu studi pustaka (*library research*) dan lapangan. Penelitian pustaka dilakukan dengan meneliti sejumlah buku, artikel, jurnal, dan laporan penelitian, jurnal. Selain itu, penelitian pustaka juga dilakukan melalui eksplorasi elektronik (*internet*) dan media cetak yang berhubungan dengan subyek penelitian ini.

Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh materi-materi penting seperti dokumentasi, arsip, jurnal, buku, dan sebagainya. Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah:

1.7.1.1 Observasi

Yaitu melakukan observasi terhadap peristiwa yang relevan dan melibatkan PKS. Misalnya peneliti menghadiri diskusi, rapat, browsing dan sebagainya.

17.1.2 Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan utama. Terhadap informan utama diberikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dahulu, kemudian informan menjawab dalam bentuk tertulis atau pun lisan. Teknik seperti ini dapat diharapkan bahwa jawaban yang diberikan informan adalah baik dan benar. Adapun informan utama itu antara lain pengurus PKS, anggota DPRD dari PKS, dan kader PKS.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, analisis ini mencoba menggambarkan dan menguraikan keadaan suatu objek berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana apa adanya. (Nawawi, 1998: 63-64). Upaya mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada upaya mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang dianalisis, agar jelas keadaannya. Oleh karena itu pada tahap ini fungsinya tidak lebih daripada penggambaran yang bersifat penemuan fakta-fakta sebagaimana adanya (*fact finding*), dan mengemukakan hubungan satu (variabel) dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diteliti itu. (Suryabrata, 1998: 18-19).

Pada tahap berikutnya analisis akan diberi bobot yang lebih tinggi yaitu dengan memberikan penafsiran yang *adequate* terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan kata lain, metode ini tidak terbatas sampai pada tingkat pengumpulan dan menyusun data saja, tetapi meliputi juga analisa interpretasi mengenai makna data yang diperoleh. (Moleong, 1999:6)

Oleh karena itu, analisis ini dipandang sebagai upaya untuk memecahkan masalah dengan mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan hubungan antargejala, dan sebagainya. (Bandingkan Bakker dan Zuber, 1992: 54).

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa metode deskriptif-kualitatif merupakan langkah-langkah metodologis dalam melakukan “representasi” objektif tentang gejala-gejala yang nampak di dalam masalah yang diteliti dengan bersumber pada literature, observasi lapangan, eksplorasi internet, yang berkaitan dengan PKS.

Terkait dengan objek kajian sebagaimana tersebut di atas maka pendekatan fenomenologis digunakan pula dalam menafsirkan “makna” data. Pendekatan fenomenologis dimaksudkan untuk meneliti data menurut bentuk-bentuk penampakkannya. Fenomenologis menunjukkan proses “menjadi” dan kemampuan mengetahui bentuk-bentuk (gejala yang nampak) secara bertahap untuk menuju pengetahuan (makna) yang benar dari objek yang diamati. Pendekatan ini hakikatnya merupakan analisis deskriptif tentang esensi atau struktur ideal dari gejala-gejala yang nampak. Jadi, dengan metode ini diharapkan akan memperoleh interpretasi tentang Dinamika Politik Islam di Indonesia Era Reformasi: Strategi Pengembangan PKS di Kebumen 1999-2014.

Salah satu konsep kunci di dalam fenomenologi adalah makna (*meaning*). Setiap pengalaman manusia selalu memiliki makna. Dikatakan sebaliknya manusia selalu memaknai pengalamannya akan dunia. Ini yang membuat kesadarannya akan suatu pengalaman unik. Orang bisa melakukan hal yang

sama, namun memaknainya secara berbeda. Orang bisa mendengarkan pembicaraan yang sama, namun memaknainya dengan cara berbeda. Lebih jauh dari itu, “pengalaman bisa menjadi bagian dari kesadaran, karena orang memaknainya.” Di dalam proses memaknai sesuatu, orang bersentuhan dengan dunia sebagai sesuatu yang teratur dan dapat dipahami (*order and intelligible*). Apa yang disebut sebagai “dunia” adalah suatu kombinasi antara realitas yang dialami dengan proses orang memaknai realitas itu. (Wattimena, 2008: 190).

Menurut John Drummond bahwa fenomenologi juga bisa digunakan untuk memahami “yang politis” (*the political*) itu sendiri. Bahkan ia menggunakan pendekatan ini untuk memahami sejarah terjadinya komunitas politis (*political community*), mulai dari komunitas kultural tradisional (*cultural community*), sampai menjadi komunitas politis legal modern (*modern legal political community*), seperti yang dikenal sekarang ini. (Drummond, 2000).

Dengan demikian sebagai sebuah pendekatan, fenomenologi cukup lentur digunakan, bahkan untuk memahami politik itu sendiri. Politik secara harfiah adalah “aktivitas yang membuat manusia mencipta, melestarikan, dan menerapkan aturan-aturan di dalam kehidupannya.” (Wattimena, 2011).

Secara fenomenologis dapat juga dikatakan, bahwa politik bukan semata kenyataan sosial (*social reality*) itu sendiri, tetapi juga merupakan suatu seni untuk memimpin, atau memerintah. Di dalam kata politik terkandung makna manajemen urusan publik (*public affairs management*). Dan, di dalam kata manajemen urusan publik sudah selalu terkandung

makna tata kelola konflik, akibat keberagaman kepentingan ataupun pandangan dunia yang ada. Dalam arti ini politik adalah kompromi di level sosial akan berbagai hal yang menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri (*social compromise*). Inilah makna fenomenologis dari politik, sebagaimana di tafsirkan dari pemikiran Heywood. Jadi, politik tidaklah dilihat segi normatifnya, seperti dalam etika politik, melainkan segi deskriptifnya, yakni sebagai tata kelola sosial yang melibatkan kompromi, guna menjaga keberadaan tata sosial itu sendiri (*the existence of social order*). (Wattimena, 2008).

Ada pengertian lain tentang politik. Politik itu tidak hanya soal ruang publik (*public sphere*), di mana orang-orang berkumpul, tetapi juga merupakan urusan privat (*private matters*). (Hardiman, 2010). Ketika memahami politik sebagai relasi-relasi kekuasaan yang bergerak di masyarakat, di situlah politik beroperasi di ruang privat, demikian tulis Heywood. Dalam sejarah filsafat politik, setidaknya ada dua macam bentuk analisis tentang makna politik. *Pertama*, adalah teori normatif tentang politik (*normative theory*). Di dalamnya para filsuf merumuskan tentang bagaimana seharusnya sebuah politik itu beroperasi di masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah pendekatan empiris di dalam memahami politik (*empirical approach*). Dalam hal ini, para filsuf mencoba memahami dinamika institusi dan struktur di masyarakat. Teori strukturasi dan teori perilaku (*behavioral theory*), menurut Heywood, dominan di dalam pendekatan ini. (Hardiman, 2010).

Pendek kata, pendekatan fenomenologis dapat membantu pemahaman politik pada dirinya sendiri yakni politik yang nampak dalam kehidupan.

1.7.2 Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif merupakan kumpulan dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang beraneka ragam, dan dilakukan dengan pengamatan secara terus menerus hingga mengakibatkan variasi data yang tinggi. (Sugiyono, 2009: 243).

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles and Huberman mengemukakan bahwa setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *antisipatory* sebelum melakukan reduksi data. *Anticipatory data reduction is occurring as the search decides (often without full awarnes) which conceptual frame work, which sites, which research question, which data collection approaches to choose.* (Sugiyono, 2009:246).

1.7.2.1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

1.7.2.2 Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

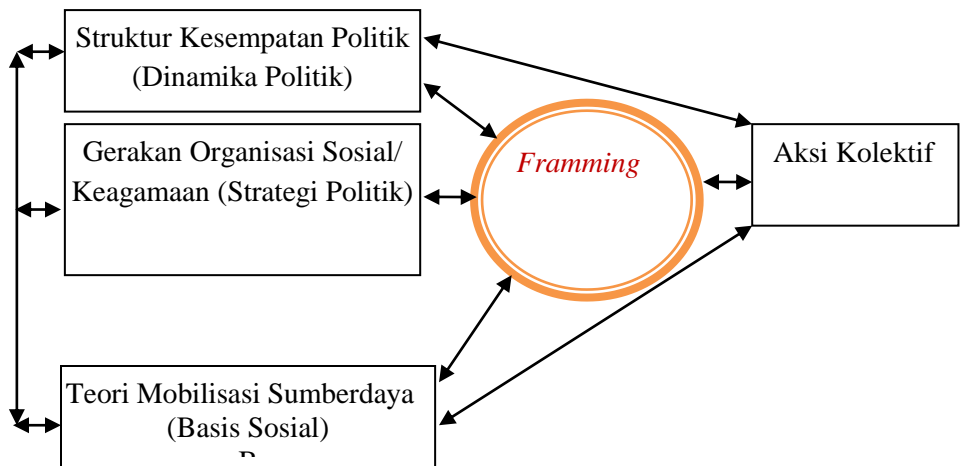
1.7.2.3 Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, data akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dan, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori. (Sugiyono, 2009: 246).

1.8 Kerangka Pemikiran

Secara sederhana kerangka berpikir dalam penulisan disertasi ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar:1.2



1.9 Sistematika Pembahasan

Tahap-tahap pembahasan merupakan sistematika laporan. Penelitian ini secara garis besar terdiri dari enam bab.

Bab 1, penulis memaparkan latar belakang penelitian, tujuan, manfaat, dan kajian pustaka, juga disajikan pemetaan teori yang terkait dengan strategi politik, basis sosial, integrasi gerakan sosial, tindakan kolektif dan kontestasi untuk membentuk negotiated order.

Bab 2, Dinamika politik Partai Keadilan Sejahtera, Kebijakan Konstitusi, Lahirnya PKS di Indonesia, Paradigma Politik PKS, Budaya Politik PKS, Rekrutmen Politik dan Kaderisasi, Sumber-sumber Finansial, Aksi Kolektif PKS, dan Peningkatan Ideologi Transnasional Islam.

Bab 3, Basis Sosial PKS di Kebumen menggambarkan *setting* mengenai historisitas, demografi Kabupaten Kebumen, Dinamika Politik Lokal Kebumen, dan Kiprah PKS dalam Pemilu di Kebumen.

Bab 4, Pengembangan Strategi Politik PKS di Kebumen, Kultur Politik antara Cita dan Fakta, Peran PKS dalam Membangun Kultur Politik, Orientasi Ideologi Islamisme, “Ijtihad Politik” PKS sebagai Partai Terbuka, Kekuatan dan Kelemahan PKS Kebumen. Dan, PKS: Genre Baru Islam Politik di Indonesia.

Bab 5, PKS sebagai Gerakan Sosial Politik di Kebumen, Implikasi Teoritik, dan Novelty.

Bab 6, Penutup yaitu berisi kesimpulan yang memuat pokok-pokok temuan penelitian sebagai jawaban dari uraian pada rumusan masalah.